

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JUAL BELI PENGE CER DI  
ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (Studi Kasus di Desa Pilang  
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MOCH. RIZAL  
NIM. C22212152**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya**

**2019**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JUAL BELI PENGE CER DI  
ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (Studi Kasus di Desa Pilang  
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**Oleh:**

**Moch. Rizal  
NIM. C22212152**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moch. Rizal

NIM : C22212152

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syari'ah/Muamalah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap  
Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer di atas  
Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus di Desa Pilang  
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 29 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Moch. Rizal

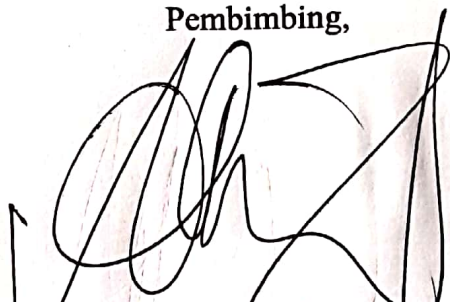
NIM. C22212152

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch Rizal, NIM. C22212152 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Januari 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

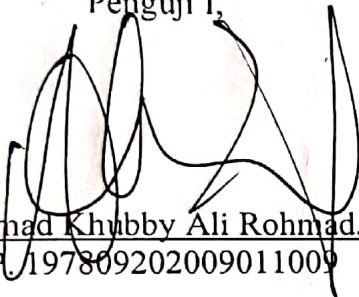
Ahmad Khubby Ali Rohmad, M.Si  
NIP. 197809202009011009

## PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Moch. Rizal, NIM. C22212152 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 07 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



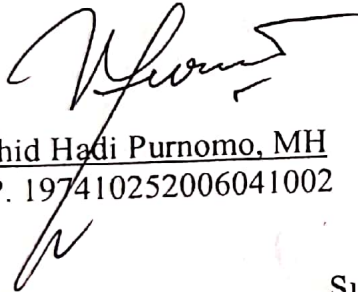
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si  
NIP. 197809202009011009

Penguji II,



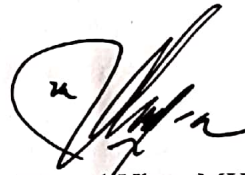
Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Penguji III,



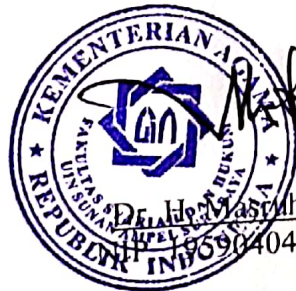
Wahid Hadi Purnomo, MH  
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, MHI  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 20 Februari 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.  
NIP. 196904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Rizal  
NIM : C22212152  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : rizalagussetyawan04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGAMBILAN  
KEUNTUNGAN JUAL BELI PENGECEK DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI  
(Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

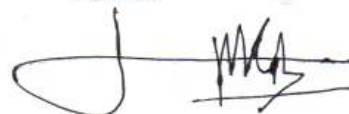
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Februari 2019

Penulis



(MOCH. RIZAL)





























Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pupuk subsidi dibagi menjadi lima macam, yakni: Pupuk Urea, Pupuk Za, Pupuk NPK, Pupuk Organik dan Pupuk SP 36. Harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian adalah 90.000/50 kg untuk pupuk Urea, Za 70.000/50 kg, NPK 115.000/50 kg, Petroganik 20.000/40 kg dan SP 36 100.000/50 kg.

Dari hasil survey dilapangan, jual beli pupuk bersubsidi di desa Pilang dilakukan antara pengecer yakni H.Sulkan dengan kelompok tani dan/atau petani yang terdaftar pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Pengecer menjual pupuk subsidi dengan harga 95.000/50 kg untuk pupuk urea, Za 75.000/50 kg, NPK 120.000/50 kg, Organik 22.000/40 kg dan SP 36 105.000/50 kg.

Dari hasil survey di atas dapat disimpulkan bahwa Pengecer mengambil keuntungan di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah, sedangkan pemerintah sudah menyediakan porsi keuntungan untuk pengecer melalui jual beli dengan distributor yang diatur dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, menyatakan, bahwa “Distributor wajib menjual Pupuk bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang lini IV Pengecer”. Pemerintah dalam hal ini tidak secara langsung











duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.<sup>11</sup> Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Rikki Andriyanto, Luhut Sihombing, Sinar Indra Kusuma, program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan judul “*Analisis Perbedaan Harga Pembelian dan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo*”. Penelitian ini menjelaskan perbandingan harga jual pupuk bersubsidi di tingkat pengecer di kabupaten Karo. Membandingkan harga jual pedagang pengecer dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah.
2. Skripsi saudara Moch. Sulhan Aditama jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN tulungagung tentang “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Paketan (Studi kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa penjual pupuk mensyaratkan pembeli untuk membeli pupuk organik dalam setiap pembelian pupuk anorganik seperti Urea, ZA, dan Phonska.
3. Skripsi saudara Wawan Munandar NIM: 12380060 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum Tahun 2016 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di desa siandong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-

---

<sup>11</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

hari mereka bergantung dari hasil pertanian. Dalam hal memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tertunda, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan kemudian hari atau ditangguhkan dengan tempo waktu. Namun dalam pengambilan hutang ada penambahan harga yang telah ditetapkan oleh penjual artinya pembelian secara tunai dan hutang itu berbeda. Misalnya, harga pupuk Urea 110.000/karung jika dibeli secara kontan, apabila membeli secara tangguh atau hutang maka harga pupuk Urea menjadi 125.000/karung.

Adapun penelitian dalam skripsi ini membahas tentang “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pengambilan keuntungan jual beli Pengecer di atas harga eceran tertinggi Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*”, penulis mencoba mengkaji tentang praktik pengambilan keuntungan jual beli Pengecer di atas harga eceran tertinggi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dari kaca mata Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini lebih difokuskan dalam pembahasan hukum boleh tidaknya kegiatan pengambilan keuntungan yang dilakukan pengecer dimana harga pokoknya sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengambilan keuntungan

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi bertujuan untuk:

















## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan teknis penulisan skripsi, yang sistematikanya terbagi dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian supaya menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang landasan teoritik yang berkaitan dengan konsep Jual Beli dalam Islam di antaranya, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, konsep Pengambilan keuntungan dalam Islam, penetapan harga dalam islam, Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Bab ketiga, gambaran umum pengambilan keuntungan pupuk subsidi oleh pengecer di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Pada bab ini, penulis memaparkan materi pokok yang menjadi sorotan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu keadaan umum Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Pengambilan keuntungan jual beli Pengecer, meliputi praktik pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi dan latar belakang Pengecer mengambil keuntungan dalam menjual pupuk subsidi ke Petani.































































- c. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
- d. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida ditingkat wilayah kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Wali kota melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- e. Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi tingkat pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- g. Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- h. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
- i. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan.



Selain membentuk tim pengawas, pemerintah juga memberikan porsi keuntungan bagi pengecer cer melalui jual beli pupuk bersubsidi antara pengecer dengan distributor, guna untuk mencegah terjadinya penjualan pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, bahwa, “Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.”

Apabila pengecer masih menjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat (4) peraturan menteri perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Maka akan diberikan sanksi, pertama: sanksi Administratif berupa peringatan tertulis, kedua: peringatan tertulis terakhir, dan ketiga: pencabutan izin SIUP. Dalam hal sanksi dan tahapan-tahapannya, dijelaskan dalam pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g, pasal 20 ayat (4) dan pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa









masih banyak. Dilihat dari segi pemanfaatan lahan, perekonomian desa pilang banyak didukung dari sektor pertanian karena melihat luas lahan yang besar setelah pemukiman.

Kondisi ekonomi desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan, yaitu Desa pertanian dan industri kecil menengah. Disamping itu tidak adanya industri/pabrik yang ada di desa maupun di dekat desa membuat sebagian besar penduduk desa bekerja ke kota terdekat. Sumber Daya Manusia yang cukup tersedia dan mempunyai semangat gotong royong yang tinggi dan kerja sama yang baik. Adapun potensi ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. Tenaga kerja dan angkatan kerja:
  - 1) Angkatan kerja
  - 2) Angkatan kerja yang sudah bekerja
  - 3) Angkatan kerja yang belum bekerja
- b. Pemberdayaan perekonomian masyarakat:
  - 1) Pembangunan bidang industri kecil
  - 2) Usaha perdagangan dan jasa
  - 3) Peningkatan usaha pertanian, dan peternakan, kerajinan
  - 4) Peningkatan usaha ternak itik, kambing dan sapi
  - 5) Peningkatan budidaya ikan lele
  - 6) Peningkatan usaha bawang goreng
  - 7) Peningkatan usaha tempe
  - 8) Peningkatan usaha kerajinan sepatu, menyulam, tas













































- Pudjihardjo, M. Nur Faizin Muhith. *Kaidah- Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Vandestra, Muhammad. *Kitab Hadis Shohih Bukhari Ultimate*. t.tp.: Dragon Promedia, 2017
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam*. Surabaya: Putra Medika Nusantara, 2010.
- Rivai, Veithzal dan Antoni Usman Nizar. *Islamic Economics and Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rizqi Romdhon, Muhammad. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafii*. Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: Anggota IKAPI, t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syafri Harapan, Syofian. *Akutansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Syah Fitri, Audah. “Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap Pengambilan Keuntungan pada Penjualan Onderdil di Bengkel Pakis Surabaya”. Skripsi--UINSA, Surabaya, 2016.
- Syahatah, Husein. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Wahid, Hidayat Nur dan Ali Yafie. *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Willya, Evra. “Ketentuan Hukum Islam Tentang Al-Tas’iru Al-Jabriyu”. *Ilmiah Al-Syir’ah Journal Iain-Manado*, 2013.
- Qusthoniayah. “Al-Tas’iru Al-Jabriyu (Penetapan oleh Negara) dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi”. *Jurnal Syariah*, No. II, Vol. II, Oktober, 2014.
- Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018.
- Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Kementrian Pertanian 2014. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi.

